



# Membangun **Ketahanan Pangan** di Tengah Ketidakpastian Global

*Rudy C Tarumingkeng*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan  
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

---

© RudyCT Academic Series

[rudyct75@gmail.com](mailto:rudyct75@gmail.com)

11 Maret 2026

## MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL

### 1. Pendahuluan

Ketahanan pangan pada abad ke-21 tidak lagi dapat dipahami sebagai urusan pertanian dalam arti sempit. Ia telah berubah menjadi isu strategis yang berada di persimpangan ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan masyarakat, perdagangan internasional, dan keamanan nasional. Definisi klasik yang masih dipakai secara luas menyatakan bahwa ketahanan pangan tercapai ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk hidup aktif dan sehat. Definisi ini mengandung empat dimensi utama: ketersediaan, akses, pemanfaatan atau utilisasi, dan stabilitas. Karena itu, negara tidak dapat mengklaim memiliki ketahanan pangan hanya karena produksi padinya meningkat. Jika harga tetap tidak terjangkau, distribusi terputus, kualitas gizi menurun, atau sistem pangan mudah terguncang oleh cuaca ekstrem dan gejolak geopolitik, maka ketahanan pangan yang sesungguhnya belum tercapai. ([World Bank](#))

Topik ini menjadi semakin mendesak karena dunia sedang bergerak dalam lanskap yang sangat tidak pasti. Laporan *Global Economic Prospects* Bank Dunia menegaskan bahwa prospek pertumbuhan global menghadapi risiko penurunan dari meningkatnya ketegangan perdagangan, sentimen pasar yang memburuk, kekhawatiran fiskal, dan kejutan inflasi. Dalam laporan yang sama, Bank Dunia juga menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan ekonomi dan perdagangan global meningkat tajam sejak era krisis keuangan global, didorong oleh konflik

bersenjata, ketegangan geopolitik, dan perubahan pendekatan kebijakan dagang. Dalam konteks seperti ini, pangan menjadi sektor yang sangat sensitif, sebab ia berada tepat di titik temu antara cuaca, energi, logistik, kurs, perdagangan, dan daya beli rumah tangga. ([World Bank](#))

Pada tingkat global, urgensinya bahkan lebih keras lagi. FAO dan lembaga-lembaga PBB mitra dalam SOFI 2025 melaporkan bahwa pada 2024 sekitar 673 juta orang masih mengalami kelaparan, sekitar 2,3 miliar orang mengalami kerawanan pangan moderat atau berat, dan 2,6 miliar orang belum mampu membeli pola makan sehat. World Bank melalui *Food Prices for Nutrition DataHub* menambahkan bahwa biaya rata-rata diet sehat pada 2024 mencapai 4,46 dolar PPP per orang per hari, sementara akses terhadap diet sehat membaik secara global tetapi sangat timpang antarkawasan. Artinya, masalah pangan dunia bukan lagi sekadar soal produksi global yang kurang, tetapi lebih dalam: persoalan keterjangkauan, disparitas regional, struktur pendapatan, inflasi pangan, dan kerentanan sistemik. ([FAOHome](#))

Bagi Indonesia, tema ini sangat relevan. Indonesia memang mencatat perbaikan produksi beras pada 2025, tetapi pada saat yang sama tetap menghadapi tekanan inflasi, kemiskinan perdesaan, persoalan logistik antardaerah, dan tantangan gizi. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukanlah persoalan satu indikator. Ia harus dibangun sebagai sistem yang mampu menjaga pasokan, menahan gejolak harga, melindungi produsen, menjamin akses kelompok rentan, dan memastikan bahwa pangan yang tersedia sungguh menopang kualitas sumber daya manusia. Dengan kerangka itulah tulisan ini membahas bagaimana membangun ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global, dengan memberi perhatian pada faktor-faktor pengganggu utama dan arah strategi kebijakan yang diperlukan, terutama bagi Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

## **2. Ketidakpastian Global dan Perubahan Makna Ketahanan Pangan**

Dalam dunia yang relatif stabil, ketahanan pangan sering diukur terutama dari produksi nasional, stok komoditas utama, dan kapasitas impor bila terjadi kekurangan. Akan tetapi, ketidakpastian global telah mengubah lanskap ini. Bank Dunia menilai bahwa pertumbuhan global kini berada dalam lingkungan eksternal yang lebih sulit, dengan tekanan dari trade tensions, climate risks, financing constraints, dan policy uncertainty. Ini berarti negara-negara tidak cukup hanya memikirkan berapa banyak pangan dapat diproduksi dalam setahun, tetapi harus memikirkan seberapa tangguh seluruh sistem pangan menghadapi guncangan eksternal. Ketahanan pangan dengan demikian bergeser dari paradigma "cukup stok" menuju paradigma "resiliensi sistem". ([World Bank](#))

Perubahan makna ini terlihat jelas dalam SOFI 2025. Laporan tersebut secara khusus mengangkat inflasi harga pangan sebagai isu sentral dan menegaskan bahwa inflasi yang tinggi di banyak negara telah melemahkan daya beli, terutama pada kelompok berpendapatan rendah, serta mengurangi akses terhadap diet sehat. Poin ini sangat penting karena menunjukkan bahwa dalam kondisi global yang tidak menentu, pangan tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai komoditas hasil tani. Ia adalah komoditas sosial-ekonomi dengan daya rambat yang luas. Kenaikan harga pangan memengaruhi rumah tangga miskin lebih cepat daripada perubahan variabel makro lain. Ia memukul kesehatan, pendidikan, kualitas konsumsi, dan dalam jangka lebih panjang, kualitas sumber daya manusia. ([FAOHome](#))

Selain itu, laporan *Global Report on Food Crises 2025* memperlihatkan lapisan kerentanan yang lebih akut. Pada 2024 lebih dari 295 juta orang di 53 negara dan wilayah mengalami kelaparan akut, meningkat 13,7 juta orang dibanding 2023. Pendorong utamanya adalah konflik, guncangan ekonomi, cuaca ekstrem, dan perpindahan paksa. Di sini terlihat bahwa ketidakpastian global bukan istilah abstrak. Ia memiliki wajah yang konkret: perang yang merusak jalur pasok, inflasi yang menekan impor,

kekeringan yang menghantam panen, dan pengungsian yang memutus kehidupan ekonomi. Dalam kondisi seperti itu, ketahanan pangan harus dibangun dengan perspektif bahwa guncangan bisa datang bersamaan dari beberapa arah sekaligus. ([World Food Programme](#))

Makna baru ketahanan pangan itu juga menuntut cara pandang yang lebih luas terhadap perdagangan. WTO menegaskan bahwa perjanjian pertanian secara eksplisit mengakui pentingnya food security. Ini berarti perdagangan internasional tetap penting bagi ketahanan pangan, tetapi tidak boleh diperlakukan secara naif. Negara yang terlalu bergantung pada satu sumber impor, satu jalur pelayaran, atau satu rezim harga global akan sangat rapuh ketika terjadi disrupsi. Sebaliknya, negara yang menutup diri sepenuhnya juga berisiko kehilangan efisiensi, keragaman pasokan, dan peluang stabilisasi melalui pasar internasional. Maka, ketahanan pangan di era ketidakpastian global mensyaratkan kombinasi antara kapasitas domestik yang kuat dan keterhubungan eksternal yang cerdas. ([World Trade Organization](#))

### **3. Inflasi Pangan sebagai Wajah Nyata Ketidakpastian**

Salah satu cara paling langsung untuk memahami ketidakpastian global adalah dengan melihat inflasi pangan. World Bank mencatat bahwa pada data terbaru yang tersedia untuk Agustus dan November 2025, inflasi harga pangan di atas 5 persen masih terjadi di 45 persen negara berpendapatan rendah, 43,5 persen negara lower-middle-income, dan 41,9 persen negara upper-middle-income. Bahkan, dalam 54 persen dari 166 negara yang datanya tersedia, inflasi pangan riil masih lebih tinggi daripada inflasi umum. Fakta ini menunjukkan bahwa pangan tetap menjadi sumber utama tekanan biaya hidup di banyak negara, bahkan ketika indikator makro lain tampak lebih terkendali. ([World Bank](#))

Secara ekonomi, inflasi pangan jauh lebih berbahaya bagi stabilitas sosial dibanding inflasi pada barang sekunder. Sebab, proporsi pengeluaran rumah tangga miskin untuk makanan jauh lebih besar. Bila harga beras,

minyak goreng, telur, cabai, atau sayur melonjak, rumah tangga tidak bisa menunda konsumsi seperti ketika harga barang elektronik naik. Mereka akan menyesuaikan dengan cara yang menyakitkan: mengurangi kualitas makan, menekan pengeluaran pendidikan, menunda berobat, atau menjual aset produktif. Dalam bahasa pembangunan, inflasi pangan bukan hanya mengurangi kesejahteraan saat ini, tetapi juga menggerus kemampuan rumah tangga keluar dari kemiskinan. SOFI 2025 secara tegas menghubungkan inflasi pangan tinggi dengan meningkatnya food insecurity dan child malnutrition. ([FAOHome](#))

Konteks Indonesia memperlihatkan hubungan ini secara sangat nyata. BPS melaporkan bahwa inflasi year-on-year pada Februari 2026 mencapai 4,76 persen. Sementara itu, Bank Indonesia dan pemerintah menegaskan sasaran inflasi 2026 berada pada kisaran  $2,5 \pm 1$  persen, dengan inflasi volatile food ditargetkan 3,0–5,0 persen. Fakta bahwa pemerintah menetapkan sasaran khusus bagi komponen pangan bergejolak menunjukkan satu hal yang penting secara akademik: pangan diperlakukan sebagai penentu utama stabilitas harga. Jika komponen ini tidak terkelola, inflasi umum akan sulit dijaga dan daya beli masyarakat akan cepat tertekan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sisi kebijakan, Bank Indonesia pada Februari 2026 meluncurkan GPIPS sebagai strategi baru untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Program ini lahir justru karena tantangan inflasi pangan makin kompleks akibat perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan sifat komoditas pangan yang musiman. Tiga strategi yang ditekankan ialah peningkatan produksi, kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah, serta penguatan sinergi pusat-daerah berbasis data neraca pangan. Pelajaran penting dari langkah ini adalah bahwa inflasi pangan tidak bisa dilawan hanya dengan operasi pasar sesaat. Ia harus dihadapi dari hulu sampai hilir. ([Bank Indonesia](#))

#### **4. Perubahan Iklim: Gangguan yang Tidak Lagi Insidental**

Jika inflasi adalah gejala yang langsung dirasakan rumah tangga, maka perubahan iklim adalah gangguan mendasar yang sedang mengubah aturan permainan sistem pangan global. WMO menegaskan bahwa 2025 merupakan salah satu dari tiga tahun terpanas yang pernah tercatat, dengan suhu rata-rata permukaan global 1,44°C di atas rerata 1850–1900. WMO juga mencatat bahwa sebelas tahun terakhir, 2015–2025, adalah sebelas tahun terpanas dalam semua kumpulan data utama. Ini bukan lagi variasi cuaca biasa, melainkan tanda bahwa pertanian, air, dan pangan sedang bekerja dalam lingkungan iklim yang makin tidak stabil. ([World Meteorological Organization](#))

IPCC dalam *AR6 Synthesis Report* menyatakan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa perubahan iklim telah menyebabkan dampak buruk yang meluas pada alam dan manusia, termasuk pada pertanian, perikanan, peternakan, mata pencaharian, kesehatan, dan ketahanan pangan. IPCC juga menunjukkan bahwa dampak tersebut tidak terdistribusi merata; kelompok yang paling rentan secara ekonomi dan sosial justru menanggung beban paling besar. Di halaman lain, IPCC menunjukkan bahwa dampak pada food production, fisheries yields, aquaculture, livestock health, and malnutrition telah teramati secara global. Artinya, perubahan iklim bukan ancaman masa depan semata; ia sudah memengaruhi kemampuan manusia memproduksi dan mengakses pangan hari ini.

Di negara berkembang, dampaknya berlapis. Pertama, perubahan pola hujan mengganggu kalender tanam. Kedua, kejadian ekstrem seperti banjir dan kekeringan memperbesar kehilangan hasil. Ketiga, suhu yang lebih tinggi memengaruhi produktivitas tanaman dan ternak. Keempat, gangguan pascapanen meningkat karena kualitas penyimpanan tradisional tidak dirancang untuk lingkungan yang makin ekstrem. Kelima, beban fiskal pemerintah bertambah karena harus menangani bencana, rehabilitasi infrastruktur, dan stabilisasi harga sekaligus. Karena

itu, membangun ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global berarti juga membangun ketahanan iklim dalam sistem pangan.

Dalam konteks Indonesia, tekanan itu terasa sangat relevan karena struktur pangan nasional masih sangat dipengaruhi musim, wilayah sentra, dan keterbatasan infrastruktur air serta pascapanen di banyak daerah. Itulah sebabnya GPIPS menekankan penggunaan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, dan pengaturan pola tanam yang lebih terkoordinasi antarkomoditas, antarwaktu, dan antarwilayah. Strategi ini menunjukkan pergeseran penting dalam kebijakan: negara tidak lagi cukup hanya mendorong petani menanam lebih banyak, tetapi harus membantu petani menanam dengan lebih tangguh terhadap risiko iklim. ([Bank Indonesia](#))

## **5. Ketegangan Perdagangan dan Fragmentasi Rantai Pasok**

Ketidakpastian global juga tampil dalam bentuk fragmentasi perdagangan. World Bank menilai bahwa prospek global menghadapi risiko dari escalating trade tensions, dan laporan GEP Januari 2025 menunjukkan bahwa lingkungan perdagangan global menjadi kurang menguntungkan bagi banyak emerging market and developing economies. Pada level lebih dalam, Bank Dunia menulis bahwa policy uncertainty dan trade policy uncertainty global telah meningkat tajam sejak awal 2000-an, dipicu oleh konflik, ketegangan geopolitik, dan perubahan pendekatan dalam kebijakan dagang. Bagi sistem pangan, ini berarti dua hal: harga global menjadi lebih mudah bergejolak dan keputusan pasokan negara pengekspor menjadi lebih tidak dapat diprediksi. ([World Bank](#))

Rantai pasok pangan sangat bergantung pada stabilitas transportasi, pembiayaan, energi, pupuk, dan pelabuhan. Jika salah satu titik terganggu, negara pengimpor dapat menghadapi keterlambatan, biaya logistik lebih tinggi, atau kenaikan harga mendadak. Pengalaman beberapa tahun terakhir juga memperlihatkan bahwa ketika

ketidakpastian meningkat, banyak negara cenderung menempuh tindakan proteksionis untuk melindungi pasar domestik mereka. Dalam jangka pendek langkah itu mungkin rasional dari sudut nasional, tetapi secara global bisa memperburuk ketidakpastian dan memperbesar kepanikan pasar. Itulah sebabnya ketahanan pangan nasional tidak bisa diserahkan begitu saja pada asumsi bahwa pasar global akan selalu bekerja lancar.

Tetapi, jawaban terhadap risiko ini bukan autarki penuh. Negara yang sepenuhnya memutus diri dari perdagangan akan kehilangan opsi stabilisasi ketika panen domestik terganggu. Jalan yang lebih realistis adalah membangun strategi perdagangan pangan yang cerdas: diversifikasi sumber impor, kontrak pasokan yang lebih aman, pemantauan dini terhadap risiko logistik, dan diplomasi pangan regional. Dalam konteks ASEAN maupun Asia yang lebih luas, kerja sama pada data stok, jalur pasok, dan pembiayaan logistik akan menjadi semakin penting ketika gangguan global makin sering. Di sini, ketahanan pangan tidak identik dengan isolasi, melainkan dengan kemampuan mengelola ketergantungan secara strategis. ([World Trade Organization](#))

## **6. Gizi, Daya Beli, dan Kelompok Rentan**

Diskusi tentang ketahanan pangan sering terjebak pada satu pertanyaan: apakah pangan tersedia. Padahal pertanyaan yang sama pentingnya adalah: apakah pangan sehat dapat dibeli oleh semua orang. World Bank melaporkan bahwa pada 2024 biaya rata-rata diet sehat mencapai 4,46 dolar PPP per orang per hari, dan sekitar 2,6 miliar orang tidak mampu membelinya. Ini berarti dunia masih menghadapi jurang besar antara "tersedianya makanan" dan "terjangkaunya pola makan sehat". Secara kebijakan, perbedaan ini penting karena negara bisa saja berhasil menahan kelangkaan bahan pokok, tetapi gagal memastikan keberagaman diet, protein, sayur, buah, dan mikronutrien yang cukup. ([World Bank](#))

SOFI 2025 menggarisbawahi bahwa inflasi tinggi telah sangat merugikan akses kelompok berpendapatan rendah terhadap diet sehat. Di sinilah ketahanan pangan bertemu langsung dengan isu keadilan sosial. Rumah tangga kelas menengah mungkin masih mampu menyesuaikan pola konsumsi ketika harga protein naik. Namun bagi rumah tangga miskin, penyesuaian sering berarti turun mutu: lebih banyak karbohidrat murah, lebih sedikit protein hewani, sayur, dan buah. Dalam jangka pendek, ini terlihat sebagai strategi bertahan. Dalam jangka panjang, ia menghasilkan malnutrisi terselubung, anemia, gangguan tumbuh kembang, dan menurunnya produktivitas. Maka, membangun ketahanan pangan harus berarti membangun keterjangkauan diet sehat, bukan sekadar memastikan gudang komoditas pokok terisi. ([FAOHome](#))

Indonesia memberikan contoh yang amat jelas tentang pentingnya dimensi gizi ini. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa prevalensi stunting nasional turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Penurunan ini merupakan kemajuan penting, tetapi Kemenkes juga mencatat variasi yang besar menurut kelompok sosial-ekonomi dan wilayah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masalah gizi tidak dapat dilepaskan dari kemiskinan, pendapatan, dan kualitas akses terhadap pangan bergizi. Dengan kata lain, keberhasilan produksi nasional tidak otomatis menghasilkan hasil gizi yang baik bila distribusi manfaat pembangunan masih timpang. ([Kementerian Kesehatan](#))

Karena itu, ketahanan pangan yang dibangun di tengah ketidakpastian global harus berpihak secara tegas pada kelompok rentan. Yang harus dijaga bukan hanya pasokan nasional, tetapi juga kemampuan rumah tangga miskin, balita, ibu hamil, lanjut usia, dan daerah tertinggal untuk memperoleh pangan sehat secara berkelanjutan. Di titik ini, kebijakan pangan dan kebijakan perlindungan sosial tidak bisa dipisahkan. World Bank dalam *Food Security Update* April 2025 bahkan mengingatkan bahwa masih ada sekitar 2 miliar orang di negara low- and middle-income yang tidak tercakup atau tidak cukup tercakup oleh

perlindungan sosial. Ini menunjukkan bahwa banyak sistem pangan nasional di dunia masih berdiri di atas jaring pengaman yang belum memadai.

## **7. Indonesia: Modal Kuat, Risiko Tetap Nyata**

Jika dilihat dari sisi produksi, Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk memperbaiki ketahanan pangannya. BPS melaporkan bahwa pada 2025 luas panen padi mencapai sekitar 11,32 juta hektare, produksi padi mencapai 60,21 juta ton GKG, dan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 34,69 juta ton. Angka ini meningkat 13,29 persen dibanding 2024. Kenaikan tersebut penting karena memberi ruang lebih besar bagi pembentukan stok, stabilisasi harga, dan pengurangan ketergantungan pada impor darurat. Dalam arti tertentu, 2025 menunjukkan bahwa kapasitas produksi domestik Indonesia masih dapat diperkuat bila kebijakan dan kondisi agroklimat cukup mendukung. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun modal produksi itu tidak boleh membuat kita lengah. BPS juga melaporkan bahwa inflasi tahunan Februari 2026 mencapai 4,76 persen. Pada saat yang sama, BI menyebut inflasi Januari 2026 naik menjadi 3,55 persen yoy, terutama dari kelompok pangan bergejolak. Dua data ini mengingatkan bahwa peningkatan produksi tahunan tidak otomatis menghilangkan tekanan harga. Faktor musiman, distribusi, biaya logistik, perilaku pasar, momen Ramadan dan Idulfitri, serta gangguan lokal masih dapat menciptakan lonjakan harga yang sangat dirasakan masyarakat. Karena itu, ketahanan pangan nasional harus diukur bukan hanya dengan tonase panen, melainkan juga dengan kestabilan akses dan harga sepanjang waktu. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Indonesia juga masih menghadapi kerentanan struktural dari sisi kemiskinan. BPS mencatat bahwa pada September 2025 persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang. Namun kemiskinan di perdesaan tetap lebih tinggi, yakni 10,72

persen, dibanding 6,60 persen di perkotaan. Ini adalah ironi yang sering muncul dalam sistem pangan: wilayah dan kelompok yang memproduksi pangan justru sering berada dalam posisi rentan. Bila pendapatan produsen pangan rapuh, maka fondasi pasokan nasional pun rapuh. Oleh sebab itu, membangun ketahanan pangan tidak cukup hanya menjaga konsumen dari kenaikan harga; ia juga harus menjaga produsen dari kerugian, gagal panen, mahalanya input, dan lemahnya akses pasar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pemerintah tampaknya menyadari kompleksitas tersebut. Selain GPIPS, pemerintah dan Bank Indonesia juga menyepakati penguatan koordinasi pusat-daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah, memperlancar distribusi pangan terutama dari wilayah surplus ke wilayah defisit, mengelola ekspektasi inflasi, dan menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat pada Februari–Maret 2026. Langkah-langkah ini mengandung pesan penting: ketahanan pangan tidak lagi dapat dikelola hanya oleh satu kementerian atau satu instrumen. Ia membutuhkan orkestrasi kebijakan makro, logistik, perlindungan sosial, dan komunikasi publik. ([Bank Indonesia](#))

## **8. Strategi Membangun Ketahanan Pangan di Tengah Ketidakpastian Global**

### **8.1 Memperkuat produksi yang adaptif, bukan sekadar menaikkan output**

Strategi pertama adalah memperkuat produksi pangan, tetapi bukan dalam logika lama yang hanya menekankan volume. Produksi harus dibangun dengan pendekatan adaptif terhadap risiko iklim, efisien dalam penggunaan air, kuat dalam pengelolaan tanah, dan cerdas dalam penjadwalan tanam. Bank Indonesia dalam GPIPS menekankan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, dan koordinasi pola tanam antarwilayah. Arah ini tepat karena inti persoalannya bukan sekadar

“lebih banyak menanam”, melainkan “lebih tangguh ketika musim tidak normal”. Dalam jangka panjang, investasi pada riset benih, irigasi, data agroklimat, dan asuransi pertanian menjadi bagian integral dari ketahanan pangan. ([Bank Indonesia](#))

## **8.2 Diversifikasi pangan untuk menyebar risiko**

Strategi kedua adalah diversifikasi pangan. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu komoditas pokok membuat sistem pangan sangat rentan terhadap satu jenis gangguan. Jika cuaca buruk, hama, atau gangguan distribusi menghantam komoditas utama, efeknya langsung merambat ke inflasi dan kecemasan sosial. Diversifikasi bukan hanya soal mengubah selera, tetapi soal menyebarkan risiko produksi, memperbaiki gizi, dan memperluas basis ekonomi daerah. Dengan kerangka *cost and affordability of healthy diets*, World Bank justru menunjukkan pentingnya melihat komposisi diet sehat secara keseluruhan, bukan hanya ketersediaan kalori. Bagi Indonesia, pangan lokal seperti sagu, jagung, umbi, ikan, kacang-kacangan, dan hortikultura lokal seharusnya diposisikan sebagai bagian dari strategi resiliensi nasional, bukan sekadar romantisme budaya. ([World Bank](#))

## **8.3 Membangun logistik, penyimpanan, dan konektivitas**

Strategi ketiga adalah membangun logistik pangan yang kuat. Dalam banyak kasus, krisis pangan bukan disebabkan kekurangan nasional, tetapi kegagalan memindahkan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit secara cepat, murah, dan aman. Itulah sebabnya BI menempatkan kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah sebagai strategi utama pengendalian inflasi pangan. Pada negara kepulauan seperti Indonesia, logistik bukan isu tambahan, melainkan jantung dari ketahanan pangan. Gudang, *cold chain*, pelabuhan, jalan, pasar induk, oftaker daerah, dan sistem data stok real time perlu dilihat sebagai infrastruktur stabilitas, bukan hanya infrastruktur ekonomi biasa. ([Bank Indonesia](#))

#### **8.4 Memperkuat cadangan pangan dan tata kelola pasar**

Strategi keempat adalah memperkuat cadangan pangan serta tata kelola pasar. Dalam lingkungan global yang tidak menentu, cadangan publik berfungsi ganda: sebagai stok fisik dan sebagai penyangga ekspektasi pasar. Saat pelaku usaha dan masyarakat tahu pemerintah memiliki kapasitas intervensi yang kredibel, kepanikan lebih mudah diredam. Di sinilah logika cadangan menjadi penting bukan sebagai simbol swasembada semata, tetapi sebagai alat manajemen risiko. Namun cadangan harus dikelola secara transparan, berbasis data, dan dikaitkan dengan distribusi, bukan hanya ditumpuk sebagai angka. Ketika cadangan lemah atau tata kelola pasar buruk, gejolak kecil pun mudah berubah menjadi lonjakan harga yang luas. ([Bank Indonesia](#))

#### **8.5 Menjadikan perlindungan sosial sebagai bagian dari desain sistem pangan**

Strategi kelima adalah menjadikan perlindungan sosial sebagai bagian permanen dari sistem pangan. Ketika inflasi naik atau bencana terjadi, rumah tangga rentan tidak bisa menunggu panen berikutnya. Mereka membutuhkan bantuan yang cepat dan tepat sasaran. World Bank mengingatkan adanya kesenjangan besar dalam cakupan perlindungan sosial di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah. Bagi Indonesia, bantuan pangan, subsidi terarah, intervensi gizi, dan dukungan bagi ibu-anak harus dilihat sebagai bagian dari ketahanan pangan, bukan sebagai kebijakan karitatif yang terpisah. Dengan cara ini, guncangan tidak langsung berubah menjadi malnutrisi, putus sekolah, atau penjualan aset rumah tangga yang bersifat destruktif.

#### **8.6 Mengintegrasikan pangan dengan agenda gizi dan kesehatan**

Strategi keenam adalah mengintegrasikan pangan dengan agenda gizi dan kesehatan. Penurunan stunting Indonesia ke 19,8 persen adalah kemajuan, tetapi juga pengingat bahwa ketahanan pangan yang sehat

tidak identik dengan kecukupan beras saja. Anak membutuhkan protein, zat besi, vitamin, dan pola makan yang seimbang. Ibu hamil memerlukan intervensi gizi dan kesehatan yang konsisten. Karena itu, keberhasilan kebijakan pangan harus dievaluasi juga dari hasil gizi: stunting, wasting, anemia, diet sehat, dan kualitas konsumsi rumah tangga. Bila indikator produksi membaik tetapi indikator gizi stagnan, maka sesungguhnya sistem pangan belum benar-benar kuat. ([Kementerian Kesehatan](#))

### **8.7 Memanfaatkan data, digitalisasi, dan sistem peringatan dini**

Strategi ketujuh adalah membangun ketahanan pangan berbasis data. Ketidakpastian global menuntut kemampuan membaca risiko lebih awal: kapan panen terancam, di mana stok menipis, komoditas apa yang paling rentan, daerah mana yang berpotensi mengalami lonjakan harga, dan kelompok mana yang paling cepat terdampak. BI menyinggung pentingnya data neraca pangan untuk kerja sama antardaerah dan perumusan kebijakan yang lebih efektif. Dalam era digital, ketahanan pangan akan sangat terbantu oleh integrasi data harga, stok, cuaca, distribusi, produksi, dan bantuan sosial. Negara yang memiliki sistem peringatan dini yang baik akan lebih siap bertindak sebelum masalah berubah menjadi krisis. ([Bank Indonesia](#))

### **8.8 Memperkuat kerja sama internasional dan regional**

Strategi kedelapan adalah memperkuat kerja sama internasional dan regional. Ketidakpastian global tidak bisa ditangani oleh satu negara sendirian, terutama ketika gangguan datang dari pasar energi, pelayaran internasional, konflik, atau perubahan harga komoditas lintas negara. WTO mengakui pentingnya food security dalam kerangka perdagangan pertanian, dan ini menjadi dasar bahwa kerja sama tetap relevan. Bagi Indonesia, penguatan diplomasi pangan, diversifikasi mitra dagang, dan kerja sama regional untuk logistik, cadangan, serta pertukaran informasi menjadi semakin penting. Dunia yang terfragmentasi justru menuntut jejaring yang lebih cerdas dan lebih adaptif. ([World Trade Organization](#))

## **9. Narasi Kebijakan: Dari Reaktif ke Antisipatif**

Banyak negara baru benar-benar memperhatikan pangan ketika harga melonjak atau stok terganggu. Pola seperti ini membuat kebijakan pangan bersifat reaktif. Pemerintah bergerak setelah krisis tampak di pasar dan di media. Padahal, membangun ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global menuntut pergeseran ke pola antisipatif. Negara perlu bekerja sebelum guncangan datang, bukan sesudahnya. Ia harus menyiapkan stok, memperbaiki logistik, melindungi petani, memperluas data, memperkuat diversifikasi, dan mendesain perlindungan sosial yang siap digunakan sewaktu-waktu. Ketika semua itu telah dibangun, gangguan global tidak otomatis menjadi krisis domestik. ([The World Bank](#))

Pola antisipatif juga membutuhkan komunikasi kebijakan yang baik. Dalam situasi tidak pasti, ekspektasi masyarakat dan pelaku pasar sangat penting. Kepanikan sering muncul bukan hanya karena stok kurang, tetapi karena informasi tidak jelas. Itulah sebabnya BI menekankan pengelolaan ekspektasi inflasi melalui sinergi kebijakan dan komunikasi. Dalam praktiknya, transparansi data stok, proyeksi panen, arah intervensi, dan distribusi bantuan dapat membantu menenangkan pasar. Di sini, ketahanan pangan bukan hanya soal komoditas, tetapi juga soal kepercayaan. Negara yang dipercaya lebih mampu menjaga stabilitas, bahkan sebelum intervensi fisik dilakukan. ([Bank Indonesia](#))

Bagi Indonesia, ini berarti membangun narasi pangan yang tidak semata-mata defensif atau seremonial. Ketahanan pangan perlu diposisikan sebagai proyek pembangunan nasional yang menghubungkan pertanian, kesehatan, logistik, teknologi, pengurangan kemiskinan, dan ketahanan sosial. Dengan begitu, pangan tidak hanya dibahas saat menjelang hari besar keagamaan atau saat harga naik, melainkan menjadi agenda permanen pembentukan daya tahan bangsa. Dalam era global yang penuh kejutan, negara yang memordukan

pangan sesungguhnya sedang menomorduakan stabilitas ekonominya sendiri. ([Bank Indonesia](#))

## **10. Penutup**

Membangun ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global berarti membangun kemampuan nasional untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan pulih dari berbagai guncangan yang datang bersamaan: inflasi pangan, konflik dan fragmentasi perdagangan, cuaca ekstrem, gangguan logistik, dan melemahnya daya beli kelompok rentan. Data global menunjukkan bahwa tantangan ini nyata. Pada 2024 dunia masih memiliki 673 juta orang lapar, 2,3 miliar orang dalam kerawanan pangan moderat atau berat, 2,6 miliar orang tidak mampu membeli diet sehat, dan lebih dari 295 juta orang di 53 negara mengalami kelaparan akut. Sementara itu, perubahan iklim terus memperburuk risiko terhadap produksi dan akses pangan. ([FAOHome](#))

Dalam konteks itu, Indonesia tidak memulai dari nol. Produksi beras 2025 meningkat signifikan, kemiskinan menurun, stunting turun, dan pemerintah telah memperkuat koordinasi kebijakan melalui GPIPS, target inflasi volatile food, serta dukungan distribusi dan bantuan pangan. Namun modal ini belum cukup bila tidak diikuti perbaikan struktural yang konsisten: produksi yang adaptif terhadap iklim, diversifikasi pangan, logistik yang efisien, cadangan yang kredibel, perlindungan sosial yang siap pakai, integrasi gizi-kesehatan, dan tata kelola berbasis data. Ketahanan pangan yang kuat bukanlah hasil dari satu musim panen yang baik, melainkan hasil dari sistem yang mampu tetap bekerja bahkan ketika dunia sedang terguncang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada akhirnya, ketahanan pangan harus dipandang sebagai fondasi stabilitas ekonomi dan martabat sosial. Negara yang mampu menjaga pangan berarti mampu menjaga harga, daya beli, kesehatan, produktivitas, dan kepercayaan publik. Sebaliknya, negara yang rapuh

pangannya akan selalu mudah diguncang oleh kejutan dari luar. Karena itu, membangun ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global sesungguhnya adalah membangun kapasitas bangsa untuk tetap berdiri teguh ketika dunia sedang berubah cepat, keras, dan tak menentu.

[\(World Bank\)](#)

**MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN DI TENGAH  
KETIDAKPASTIAN GLOBAL**

## Abstrak

Makalah ini membahas bagaimana ketahanan pangan perlu dibangun kembali sebagai agenda strategis nasional dan global di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, fragmentasi perdagangan, konflik, serta tekanan inflasi pangan. Berangkat dari pemahaman bahwa ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan, tetapi juga akses, pemanfaatan gizi, dan stabilitas antarkurun waktu, tulisan ini menegaskan bahwa sistem pangan yang tangguh merupakan prasyarat bagi stabilitas ekonomi, perlindungan sosial, dan kualitas sumber daya manusia. Laporan *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025* menunjukkan bahwa pada 2024 sekitar 673 juta orang di dunia masih mengalami kelaparan, sekitar 2,3 miliar orang berada dalam kondisi kerawanan pangan moderat atau berat, dan sekitar 2,6 miliar orang belum mampu membeli pola makan sehat. Pada saat yang sama, *Global Report on Food Crises 2025* mencatat lebih dari 295 juta orang di 53 negara dan wilayah mengalami kelaparan akut, didorong oleh konflik, guncangan ekonomi, cuaca ekstrem, dan perpindahan paksa. Fakta-fakta tersebut menandakan bahwa ketahanan pangan global masih rapuh dan mudah terguncang oleh kombinasi risiko yang saling memperkuat. ([FAOHome](#))

Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis telaah literatur dan data sekunder dari lembaga-lembaga resmi internasional dan nasional, khususnya FAO, World Bank, WFP, IPCC, WMO, BPS, Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa ketidakpastian global telah mengubah makna ketahanan pangan dari sekadar persoalan produksi menjadi persoalan resiliensi sistem. Inflasi pangan mengikis daya beli rumah tangga miskin, perubahan iklim mengganggu produksi dan distribusi, ketegangan perdagangan meningkatkan kerentanan pasokan, sementara lemahnya perlindungan

sosial memperbesar risiko gizi buruk dan penurunan kualitas hidup. Dalam konteks Indonesia, kenaikan produksi beras pada 2025, penurunan angka kemiskinan, dan turunnya prevalensi stunting merupakan kemajuan penting, tetapi tekanan inflasi, kemiskinan perdesaan, disparitas logistik, dan kebutuhan intervensi pasar menunjukkan bahwa tantangan struktural masih besar. ([World Bank](#))

Makalah ini menyimpulkan bahwa pembangunan ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global harus bertumpu pada tujuh strategi utama: produksi adaptif terhadap iklim, diversifikasi pangan, penguatan logistik dan cadangan, perlindungan sosial yang responsif, integrasi pangan dengan agenda gizi dan kesehatan, tata kelola berbasis data, serta kerja sama regional dan global yang lebih cerdas. Dengan demikian, ketahanan pangan bukan hanya tujuan sektor pertanian, melainkan pilar pembangunan yang menopang kestabilan ekonomi, kohesi sosial, dan kedaulatan bangsa dalam jangka panjang. ([Bank Indonesia](#))

**Kata kunci:** ketahanan pangan, ketidakpastian global, inflasi pangan, perubahan iklim, stabilitas sosial, Indonesia

---

## 1. Pendahuluan

Ketahanan pangan menempati posisi sentral dalam pembangunan karena pangan adalah kebutuhan paling dasar sekaligus komoditas yang paling cepat meneruskan guncangan ekonomi ke kehidupan sehari-hari masyarakat. World Bank, merujuk pada definisi World Food Summit 1996, menjelaskan bahwa ketahanan pangan tercapai ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk hidup aktif dan sehat. Definisi ini menegaskan empat dimensi utama: ketersediaan, akses, pemanfaatan atau utilisasi, dan stabilitas. Karena itu, negara tidak dapat menyatakan

dirinya aman pangan hanya dengan melihat volume produksi; negara juga harus memastikan keterjangkauan, kualitas gizi, dan ketahanan sistem terhadap gangguan jangka pendek maupun jangka panjang. ([World Bank](#))

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap global menunjukkan bahwa ketahanan pangan makin sulit dipisahkan dari dinamika ekonomi dunia. World Bank dalam *Global Economic Prospects* menilai bahwa perekonomian global menghadapi risiko penurunan akibat meningkatnya ketegangan perdagangan, memburuknya sentimen pasar keuangan, kekhawatiran fiskal, dan kejutan inflasi. Laporan yang sama juga menekankan bahwa banyak negara berkembang masih belum sepenuhnya pulih secara pendapatan per kapita dibanding periode sebelum pandemi, sehingga daya tahan sosial-ekonominya tetap rapuh. Dalam lingkungan semacam itu, sistem pangan menjadi salah satu sektor yang paling mudah terguncang karena bergantung pada cuaca, energi, transportasi, kurs, pembiayaan, dan arus perdagangan lintas negara. ([Open Knowledge Portal](#))

Urgensi persoalan ini terlihat sangat jelas pada data global mutakhir. SOFI 2025 menunjukkan bahwa pada 2024 sekitar 673 juta orang masih mengalami kelaparan, setara 8,2 persen populasi dunia. Di saat yang sama, sekitar 2,3 miliar orang mengalami kerawanan pangan moderat atau berat, sementara sekitar 2,6 miliar orang belum mampu membeli diet sehat. Perbaikan global memang mulai terlihat dibanding tahun-tahun puncak krisis, tetapi perbaikannya kecil, tidak merata, dan sangat dipengaruhi oleh tingginya inflasi harga pangan, terutama bagi masyarakat miskin di negara berpendapatan rendah. ([FAOHome](#))

Laporan *Global Report on Food Crises 2025* memberi gambaran yang lebih keras tentang sisi akut persoalan ini. Pada 2024 lebih dari 295 juta orang di 53 negara dan wilayah mengalami tingkat kelaparan akut, meningkat sekitar 13,7 juta orang dibanding 2023. Pendorong utamanya

adalah konflik, guncangan ekonomi, cuaca ekstrem, dan perpindahan paksa. Ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan modern tidak dapat lagi dibangun dengan asumsi bahwa gangguan terjadi satu per satu. Dalam kenyataan mutakhir, krisis sering datang secara simultan: perang merusak jalur distribusi, inflasi menekan daya beli, cuaca ekstrem merusak produksi, dan negara-negara miskin memiliki ruang fiskal yang terbatas untuk menahan semuanya sekaligus. ([World Food Programme](#))

Dalam konteks Indonesia, isu ini sangat relevan. Indonesia memang mengalami kenaikan produksi padi dan beras pada 2025, tetapi inflasi tahunan Februari 2026 tetap mencapai 4,76 persen, sementara pemerintah dan Bank Indonesia masih harus secara aktif menjaga inflasi pangan bergejolak dalam kisaran 3,0–5,0 persen. Pada sisi lain, persentase penduduk miskin pada September 2025 masih 8,25 persen, dengan tingkat kemiskinan perdesaan yang tetap lebih tinggi daripada perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia telah memiliki modal yang kuat di sisi produksi, tetapi masih menghadapi tantangan pada sisi akses, distribusi, dan perlindungan kelompok rentan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bertolak dari latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan menganalisis bagaimana ketahanan pangan dapat dibangun di tengah ketidakpastian global. Fokus pembahasannya meliputi: pertama, landasan konseptual ketahanan pangan; kedua, bentuk-bentuk ketidakpastian global yang memengaruhi sistem pangan; ketiga, kondisi dan pembelajaran dari konteks Indonesia; dan keempat, strategi kebijakan untuk membangun sistem pangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, ketahanan pangan diposisikan bukan sekadar sebagai isu pertanian, melainkan sebagai fondasi stabilitas ekonomi dan sosial bangsa. ([World Bank](#))

## 2. Metode Penulisan

Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode telaah literatur dan analisis data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama tulisan adalah membangun argumen akademik dan kebijakan mengenai hubungan antara ketahanan pangan dan ketidakpastian global, bukan menguji satu hipotesis kuantitatif tertentu. Data dan rujukan dikumpulkan dari dokumen resmi lembaga internasional dan nasional, serta sejumlah karya akademik yang relevan untuk memperkuat kerangka analisis. ([World Bank](#))

Sumber utama yang dipakai meliputi laporan FAO, World Bank, WFP, WTO, IPCC, dan WMO untuk menggambarkan dinamika global; serta BPS, Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Kesehatan RI untuk konteks Indonesia. Selain itu, beberapa rujukan akademik klasik dan kontemporer—seperti karya Amartya Sen mengenai *entitlement approach*, kajian Bellemare mengenai hubungan harga pangan dan kerusakan sosial, serta kajian IMF oleh Arezki dan Brückner mengenai harga pangan dan instabilitas politik—digunakan untuk memberikan landasan teoretis dan empiris yang lebih kuat. ([OUP Academic](#))

Secara analitis, pembahasan dilakukan dalam empat tahap. Pertama, menjelaskan konsep dasar ketahanan pangan sebagai sistem multi-dimensi. Kedua, memetakan bentuk-bentuk ketidakpastian global yang paling relevan bagi sistem pangan, yaitu inflasi pangan, perubahan iklim, konflik dan gejolak geopolitik, serta fragmentasi perdagangan. Ketiga, menelaah bagaimana dinamika tersebut tercermin dalam konteks Indonesia melalui indikator produksi, inflasi, kemiskinan, stunting, dan intervensi kebijakan. Keempat, merumuskan strategi kebijakan untuk membangun sistem pangan yang lebih tangguh dalam jangka menengah dan panjang. ([World Food Programme](#))

Keterbatasan pendekatan ini adalah bahwa tulisan ini tidak menggunakan survei lapangan atau model ekonometrik untuk mengukur besarnya pengaruh tiap variabel secara presisi. Namun, untuk tujuan makalah akademik yang bersifat sintesis dan kebijakan, pendekatan ini tetap relevan karena memungkinkan integrasi antara fakta mutakhir, kerangka konseptual, dan implikasi praktis yang dapat digunakan untuk diskusi pengajaran, penelitian, dan perumusan kebijakan. ([World Bank](#))

---

### **3. Landasan Konseptual Ketahanan Pangan**

Secara teoretis, ketahanan pangan telah berkembang dari pendekatan yang menekankan kecukupan pasokan menjadi pendekatan yang lebih komprehensif. Pada masa lalu, diskusi tentang pangan sering terpusat pada produksi nasional dan ketersediaan stok. Akan tetapi, pengalaman berbagai krisis menunjukkan bahwa kelaparan dan kerawanan pangan dapat tetap terjadi meskipun pangan tersedia secara agregat. World Bank menekankan bahwa ketahanan pangan harus dipahami melalui empat dimensi: *availability*, *access*, *utilization*, dan *stability*. Dengan kata lain, pangan harus ada, dapat dijangkau, dimanfaatkan secara sehat, dan stabil dari waktu ke waktu. ([World Bank](#))

Dimensi ketersediaan berkaitan dengan tersedianya pangan secara fisik melalui produksi, impor, cadangan, dan distribusi. Dimensi akses menekankan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan, baik karena pendapatan yang cukup maupun karena infrastruktur dan pasar yang terjangkau. Dimensi utilisasi mengingatkan bahwa pangan bukan hanya soal kalori, tetapi juga kualitas gizi, keamanan pangan, kebersihan, kesehatan, dan pola konsumsi. Adapun dimensi stabilitas berarti ketiga unsur tersebut tidak boleh hanya terpenuhi pada masa

normal; ia harus tetap terjaga saat terjadi guncangan harga, bencana, musim ekstrem, atau ketegangan geopolitik. ([World Bank](#))

Karya Amartya Sen memberikan pijakan penting untuk memahami mengapa ketersediaan pangan saja tidak cukup. Dalam *Poverty and Famines*, Sen menunjukkan bahwa kelaparan dan kematian akibat pangan sering kali bukan disebabkan oleh ketiadaan pangan secara total, melainkan oleh runtuhnya *entitlement*—yaitu kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk memperoleh pangan melalui pekerjaan, produksi, perdagangan, atau aset yang dimilikinya. Perspektif ini sangat relevan untuk masa kini, karena banyak rumah tangga modern mengalami kerawanan pangan justru akibat inflasi, hilangnya pekerjaan, atau melemahnya pendapatan riil, bukan semata karena gudang negara kosong. ([OUP Academic](#))

Perspektif ini juga membantu menjelaskan hubungan erat antara ketahanan pangan, kemiskinan, dan stabilitas sosial. Kajian Bellemare menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan berhubungan dengan peningkatan keresahan sosial, sementara IMF melalui studi Arezki dan Brückner menemukan bahwa di negara berpendapatan rendah, kenaikan harga pangan internasional terkait dengan memburuknya institusi demokrasi dan meningkatnya demonstrasi antarpemerintah, kerusuhan, serta konflik sipil. Temuan-temuan tersebut tidak berarti pangan adalah satu-satunya sebab instabilitas, tetapi jelas menunjukkan bahwa pangan berfungsi sebagai akselerator sosial ketika daya beli menurun dan ketidakpuasan politik sudah tinggi. ([OUP Academic](#))

Karena itu, ketahanan pangan modern lebih tepat dipahami sebagai kemampuan sistem pangan untuk menyediakan pangan yang cukup, terjangkau, bergizi, dan berkelanjutan dalam kondisi normal maupun saat terjadi gangguan. Sistem ini tidak hanya mencakup sektor pertanian, tetapi juga energi, transportasi, perdagangan, pembiayaan, kesehatan, perlindungan sosial, tata kelola, dan informasi. Makin

kompleks ketidakpastian global, makin kuat pula kebutuhan untuk mengelola pangan sebagai sistem lintas-sektor. ([World Bank](#))

---

## 4. Ketidakpastian Global dan Dampaknya terhadap Sistem Pangan

### 4.1 Inflasi pangan dan erosi daya beli

Salah satu wajah paling nyata dari ketidakpastian global adalah inflasi pangan. World Bank dalam *Food Security Update 2025* menunjukkan bahwa inflasi harga pangan domestik masih tinggi di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah; dalam lebih dari separuh negara yang datanya tersedia, inflasi pangan riil masih melampaui inflasi umum. Artinya, pangan tetap menjadi sumber tekanan biaya hidup yang paling nyata, khususnya bagi masyarakat miskin yang membelanjakan proporsi besar pendapatannya untuk makanan. ([The World Bank](#))

FAO dalam SOFI 2025 juga menegaskan bahwa inflasi harga pangan yang tinggi telah secara langsung menurunkan keterjangkauan diet sehat, terutama di negara-negara miskin. Meskipun secara global jumlah orang yang tidak mampu membeli diet sehat turun dari 2,76 miliar pada 2019 menjadi 2,60 miliar pada 2024, perbaikan itu tidak merata. Di negara berpendapatan rendah, jumlah orang yang tidak mampu membeli diet sehat justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi pangan tidak hanya memengaruhi jumlah konsumsi, tetapi juga kualitas konsumsi. Rumah tangga cenderung bergeser ke makanan yang lebih murah, lebih mengenyangkan, tetapi kurang bergizi. ([FAOHome](#))

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, inflasi pangan sangat berbahaya karena sifatnya regresif. Ketika harga bahan pokok naik, rumah tangga miskin tidak memiliki banyak ruang penyesuaian. Mereka tidak dapat menunda konsumsi seperti ketika harga barang tahan lama naik. Yang mereka lakukan biasanya adalah menurunkan kualitas makan,

mengurangi frekuensi konsumsi protein, menunda pengobatan, atau mengurangi pengeluaran pendidikan. Karena itu, inflasi pangan tidak hanya menurunkan kesejahteraan jangka pendek, tetapi juga dapat merusak akumulasi modal manusia. ([The World Bank](#))

#### **4.2 Konflik, guncangan ekonomi, dan kelaparan akut**

Ketidakpastian global juga hadir melalui konflik bersenjata dan guncangan ekonomi besar. *Global Report on Food Crises 2025* menunjukkan bahwa konflik masih menjadi pendorong utama kelaparan akut di dunia, diikuti guncangan ekonomi dan cuaca ekstrem. Pada 2024 lebih dari 295 juta orang mengalami kelaparan akut di 53 negara dan wilayah. Laporan ini menegaskan bahwa konflik bukan hanya merusak produksi, tetapi juga memutus distribusi, menghancurkan daya beli, memindahkan penduduk, dan membuat bantuan kemanusiaan sulit menjangkau wilayah terdampak. ([World Food Programme](#))

Guncangan ekonomi bekerja dengan cara berbeda, tetapi sama destruktifnya. Ketika nilai tukar melemah, energi naik, biaya pupuk meningkat, dan ruang fiskal pemerintah menyempit, maka kapasitas negara untuk menjaga pasokan pangan dan menahan harga menjadi terbatas. Dalam kondisi seperti itu, negara yang sangat tergantung pada impor pangan atau input produksi akan lebih rapuh. Ketidakpastian global lalu berubah menjadi ketidakpastian domestik, dan dari sana menjalar ke dapur rumah tangga. ([Open Knowledge Portal](#))

#### **4.3 Perubahan iklim sebagai gangguan struktural**

Perubahan iklim adalah faktor yang membuat ketidakpastian pangan tidak lagi insidental. IPCC dalam *AR6 Synthesis Report* menyatakan dengan keyakinan tinggi bahwa perubahan iklim telah mengurangi ketahanan pangan dan memengaruhi keamanan air. Dampak tersebut tampak dalam menurunnya produktivitas di berbagai wilayah, terganggunya perikanan, kesehatan ternak, dan meningkatnya risiko malnutrisi. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pangan global sedang

bekerja di bawah tekanan ekologis yang makin berat. ([Open Knowledge Portal](#))

WMO menambahkan bahwa 2025 merupakan salah satu dari tiga tahun terpanas yang pernah tercatat, dan bahwa sebelas tahun terakhir adalah sebelas tahun terpanas dalam seluruh catatan modern. Implikasinya bagi pangan sangat luas: pola hujan berubah, frekuensi kekeringan dan banjir meningkat, serangan hama bergeser, dan risiko kehilangan pascapanen membesar. Dengan demikian, ketahanan pangan abad ini tidak mungkin dibangun tanpa ketahanan iklim. Negara yang mengabaikan adaptasi iklim sesungguhnya sedang membiarkan fondasi pangannya makin rapuh. ([Bank Indonesia](#))

#### **4.4 Fragmentasi perdagangan dan kerentanan rantai pasok**

Ketegangan perdagangan global memperbesar kerentanan pangan karena sistem pangan modern sangat terhubung dengan logistik lintas negara. WTO mengakui pentingnya food security dalam kerangka perdagangan pertanian, yang menunjukkan bahwa perdagangan adalah bagian dari solusi, tetapi juga bagian dari risiko. Jika jalur perdagangan terganggu, pembatasan ekspor diberlakukan, atau biaya logistik melonjak, maka negara pengimpor akan cepat mengalami tekanan harga dan kekurangan pasokan. ([World Bank](#))

World Bank dalam *Global Economic Prospects* mencatat bahwa meningkatnya ketegangan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan global menjadi salah satu sumber utama risiko bagi ekonomi dunia. Dalam konteks pangan, hal ini berarti negara perlu merancang strategi yang tidak terlalu bergantung pada satu sumber impor, satu jalur logistik, atau satu model pasokan. Ketahanan pangan membutuhkan kombinasi antara kapasitas produksi domestik yang kuat dan keterhubungan global yang terdiversifikasi. ([Open Knowledge Portal](#))

---

## **5. Kondisi Indonesia: Peluang dan Kerentanan**

### **5.1 Perbaikan produksi sebagai modal dasar**

Dari sisi produksi, Indonesia memiliki modal yang cukup kuat. BPS melaporkan bahwa pada 2025 luas panen padi mencapai sekitar 11,32 juta hektare dan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibanding 2024. Kenaikan ini penting karena memberi ruang lebih besar bagi pembentukan stok, penyerapan domestik, dan upaya stabilisasi. Ia juga menunjukkan bahwa kapasitas produksi nasional masih dapat diperkuat ketika dukungan kebijakan, pola musim, dan faktor teknis lapangan relatif mendukung. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, secara analitis produksi yang membaik hanyalah salah satu pilar ketahanan pangan. Ia belum otomatis menjamin harga tetap rendah, distribusi merata, dan konsumsi rumah tangga lebih sehat. Produksi yang tinggi tetap dapat disertai gejolak harga jika logistik lemah, pasokan antardaerah tidak sinkron, atau ekspektasi pasar tidak terkelola dengan baik. Karena itu, keberhasilan di hulu harus dibaca bersama indikator lain seperti inflasi, stok, dan daya beli masyarakat. ([Bank Indonesia](#))

### **5.2 Inflasi dan tantangan daya beli**

BPS mencatat bahwa pada Februari 2026 inflasi year-on-year mencapai 4,76 persen. Bank Indonesia dan pemerintah kemudian menegaskan sasaran inflasi 2026 pada kisaran  $2,5 \pm 1$  persen serta sasaran inflasi harga bergejolak 3,0–5,0 persen. Di sini terlihat bahwa pangan menempati posisi strategis dalam arsitektur stabilitas makro Indonesia. Bila komoditas pangan bergejolak tidak dikendalikan, maka sasaran inflasi umum akan sulit tercapai dan daya beli masyarakat akan langsung tertekan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia bahkan menyebut bahwa inflasi nasional Januari 2026 meningkat menjadi 3,55 persen terutama dari kelompok pangan bergejolak. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan isu sektoral yang terpisah dari kebijakan moneter dan stabilitas makro. Ia justru adalah salah satu jalur utama di mana gangguan cuaca, distribusi, dan pasokan memengaruhi keseharian ekonomi nasional. ([Bank Indonesia](#))

### **5.3 Kemiskinan, desa, dan kerentanan produsen**

Pada September 2025 persentase penduduk miskin Indonesia turun menjadi 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang. Ini kemajuan penting. Namun, BPS juga mencatat bahwa kemiskinan perdesaan tetap lebih tinggi dibanding perkotaan. Fakta ini perlu dibaca secara hati-hati karena daerah perdesaan adalah basis utama produksi pangan. Dengan kata lain, para produsen pangan nasional sendiri masih banyak yang hidup dalam kondisi rentan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Hal ini menimbulkan paradoks kebijakan: sistem pangan nasional bertumpu pada kelompok yang daya tahannya lemah terhadap gagal panen, fluktuasi harga, mahalnya input, dan keterbatasan akses pasar. Jika petani dan produsen pangan tidak memperoleh perlindungan yang memadai, maka ketahanan pangan nasional menjadi rapuh dari sisi hulu. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti juga menjaga keberlanjutan ekonomi produsen pangan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

### **5.4 Gizi dan kualitas ketahanan pangan**

Kemajuan produksi juga harus dibaca bersama indikator gizi. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen pada 2024. Ini adalah capaian penting, tetapi tetap menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi beban gizi yang cukup besar. Ketahanan pangan yang sehat tidak cukup diukur dari

ketersediaan beras atau stabilitas harga, melainkan juga dari seberapa jauh rumah tangga mampu mengakses protein, sayur, buah, dan pangan bergizi lainnya. ([Kementerian Kesehatan](#))

Dengan demikian, Indonesia menghadapi dua pekerjaan besar secara bersamaan: menjaga pasokan dan menahan inflasi, sekaligus memperbaiki kualitas diet masyarakat. Jika hanya fokus pada kuantitas bahan pokok, maka ketahanan pangan bisa terlihat baik secara statistik, tetapi belum cukup menopang pembangunan sumber daya manusia. ([Kementerian Kesehatan](#))

### **5.5 Cadangan dan intervensi pemerintah**

Pemerintah Indonesia telah menggunakan kombinasi cadangan dan intervensi pasar sebagai alat stabilisasi. Badan Pangan Nasional pada Januari 2026 menyebut stok Cadangan Beras Pemerintah sekitar 3,3 juta ton dan memproyeksikan stok bisa mencapai 5–6 juta ton pada pertengahan tahun apabila penyerapan domestik berjalan sesuai target. Selain itu, hingga 31 Januari 2026 realisasi penyaluran beras SPHP mencapai sekitar 902,7 ribu ton. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan pasokan dan mengendalikan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri. ([Badan Pangan Nasional](#))

Di samping itu, pada Juli 2025 Badan Pangan Nasional menugaskan penyaluran bantuan pangan beras kepada 18.277.083 penerima, masing-masing 10 kilogram per bulan untuk dua bulan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menggunakan instrumen stok dan pasar, tetapi juga perlindungan sosial berbasis pangan untuk menjaga daya beli kelompok rentan. Ini penting karena dalam situasi ketidakpastian, bantuan pangan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga makro-stabilisasi: ia membantu menjaga konsumsi minimum rumah tangga dan mencegah tekanan ekonomi memburuk menjadi krisis sosial. ([Badan Pangan Nasional](#))

## **6. Strategi Membangun Ketahanan Pangan di Tengah Ketidakpastian Global**

### **6.1 Produksi yang adaptif terhadap iklim**

Strategi pertama adalah memperkuat produksi pangan yang adaptif terhadap risiko iklim. IPCC telah menunjukkan bahwa perubahan iklim sudah mengurangi ketahanan pangan, sedangkan WMO menunjukkan tren pemanasan global yang terus berlanjut. Karena itu, produksi pangan tidak boleh lagi didesain berdasarkan asumsi musim normal. Dibutuhkan benih yang lebih tahan terhadap kekeringan dan banjir, pengelolaan air yang lebih efisien, perlindungan pascapanen, serta sistem peringatan dini berbasis data cuaca dan musim. ([Open Knowledge Portal](#))

Dalam konteks Indonesia, arah ini mulai tampak pada GPIPS yang ditekankan Bank Indonesia, yakni penggunaan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, dan pengaturan pola tanam yang lebih terkoordinasi. Kebijakan semacam ini penting karena membangun resiliensi lebih murah daripada menangani krisis setelah panen gagal atau harga melonjak. ([Bank Indonesia](#))

### **6.2 Diversifikasi pangan dan diet sehat**

Strategi kedua adalah diversifikasi pangan. SOFI 2025 menekankan bahwa persoalan utama dunia bukan hanya kekurangan kalori, tetapi mahalnya diet sehat. Karena itu, negara tidak boleh membatasi visi ketahanan pangan pada satu komoditas pokok. Sistem pangan yang tangguh harus menyediakan dan mendorong konsumsi pangan yang beragam, termasuk sumber protein, sayuran, buah, dan pangan lokal yang sesuai dengan ekologi setempat. ([FAOHome](#))

Bagi Indonesia, diversifikasi pangan memiliki manfaat ganda. Dari sisi ekonomi, ia menyebarkan risiko produksi dan mengurangi

ketergantungan berlebihan pada satu komoditas. Dari sisi gizi, ia memperbaiki kualitas konsumsi rumah tangga. Dari sisi budaya dan wilayah, ia membuka ruang bagi penguatan pangan lokal seperti sagu, jagung, umbi-umbian, ikan, dan komoditas spesifik daerah lain yang selama ini belum optimal dimasukkan ke arsitektur pangan nasional. ([Kementerian Kesehatan](#))

### **6.3 Penguatan logistik dan konektivitas**

Strategi ketiga adalah memperkuat logistik pangan. Banyak gangguan pangan bukan muncul karena produksi nasional kurang, tetapi karena distribusi tidak lancar. Dalam negara kepulauan seperti Indonesia, biaya logistik, keterbatasan gudang, *cold chain*, konektivitas antarwilayah, dan informasi stok memengaruhi harga secara langsung. Karena itu, investasi pada logistik pangan harus diperlakukan sebagai investasi stabilitas, bukan hanya investasi infrastruktur biasa. ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia secara eksplisit menempatkan kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah sebagai bagian inti pengendalian inflasi pangan. Arah ini harus dilanjutkan dengan penguatan kerja sama antar-daerah, integrasi pasar fisik dan digital, serta kemampuan memindahkan pasokan dari wilayah surplus ke wilayah defisit secara cepat dan efisien. ([Bank Indonesia](#))

### **6.4 Cadangan pangan yang kredibel**

Strategi keempat adalah menjaga cadangan pangan publik yang kredibel. Cadangan berfungsi bukan hanya sebagai stok fisik, tetapi juga sebagai alat pembentuk ekspektasi pasar. Ketika pemerintah terbukti memiliki stok yang memadai dan mampu menyalurkannya secara efektif, maka kepanikan pasar lebih mudah diredam. Sebaliknya, bila cadangan lemah, spekulasi mudah meningkat dan guncangan kecil bisa berubah menjadi lonjakan harga besar. ([Badan Pangan Nasional](#))

Namun, cadangan tidak cukup hanya ditumpuk. Ia harus terhubung dengan sistem data, proyeksi panen, distribusi, dan mekanisme intervensi yang transparan. Cadangan yang kuat tetapi tata kelolanya lemah dapat menimbulkan inefisiensi atau salah sasaran. Karena itu, manajemen cadangan perlu dilihat sebagai bagian dari tata kelola risiko nasional. ([Badan Pangan Nasional](#))

### **6.5 Perlindungan sosial yang responsif**

Strategi kelima adalah memperkuat perlindungan sosial. Pendekatan Sen mengenai *entitlement* menunjukkan bahwa rumah tangga bisa rawan pangan bukan karena pangan hilang, tetapi karena kemampuan mereka memperolehnya runtuh. Dalam situasi inflasi atau bencana, bantuan pangan, transfer tunai, subsidi terarah, dan program gizi ibu-anak berfungsi menjaga agar kerentanan rumah tangga tidak berubah menjadi malnutrisi atau kemiskinan yang lebih dalam. ([OUP Academic](#))

World Bank juga menyoroti bahwa masih banyak penduduk di negara berpendapatan rendah dan menengah yang belum tercakup perlindungan sosial secara memadai. Bagi Indonesia, ini berarti bantuan pangan beras, dukungan untuk keluarga rentan, dan integrasi data sosial-ekonomi harus terus diperkuat agar intervensi bisa cepat, tepat sasaran, dan adaptif terhadap gejolak harga maupun bencana. ([The World Bank](#))

### **6.6 Integrasi pangan dengan agenda gizi dan kesehatan**

Strategi keenam adalah mengintegrasikan kebijakan pangan dengan agenda gizi dan kesehatan. Penurunan stunting ke 19,8 persen merupakan kemajuan, tetapi juga pengingat bahwa ketahanan pangan harus diukur dari hasil gizi, bukan hanya dari tonase panen. Sistem pangan yang kuat harus membuat ibu hamil, balita, anak sekolah, dan kelompok rentan lainnya lebih mudah memperoleh diet sehat. Ini membutuhkan kolaborasi erat antara kebijakan pangan, kesehatan

publik, sanitasi, edukasi konsumsi, dan perlindungan sosial. ([Kementerian Kesehatan](#))

### **6.7 Tata kelola berbasis data**

Strategi ketujuh adalah membangun tata kelola pangan berbasis data. Dalam dunia yang tidak pasti, negara membutuhkan informasi real time tentang produksi, stok, distribusi, harga, cuaca, dan kelompok rentan. Keputusan yang terlambat atau berbasis data lemah membuat kebijakan pangan bersifat reaktif. Sebaliknya, sistem data yang kuat memungkinkan pemerintah membaca gejala krisis lebih dini dan bertindak sebelum gejolak menjadi besar. ([Bank Indonesia](#))

### **6.8 Kerja sama regional dan global**

Strategi kedelapan adalah memperkuat kerja sama regional dan global. WTO menegaskan pentingnya food security dalam kerangka perdagangan pertanian. Ini berarti perdagangan dan kerja sama internasional tetap diperlukan, terutama untuk diversifikasi sumber pasokan, pertukaran informasi, dan pengelolaan risiko bersama. Dalam dunia yang lebih terfragmentasi, ketahanan pangan tidak bisa dibangun melalui isolasi total, melainkan melalui keterhubungan yang lebih cerdas, lebih aman, dan lebih terdiversifikasi. ([World Bank](#))

---

## **7. Tantangan Implementasi**

Meskipun arah strategisnya cukup jelas, implementasi kebijakan ketahanan pangan menghadapi sejumlah kendala. Pertama, koordinasi antarlembaga sering belum cukup kuat. Pangan menyentuh pertanian, perdagangan, keuangan, perhubungan, kesehatan, dan perlindungan sosial sekaligus. Tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan cenderung sektoral dan saling menunggu. Kedua, kualitas data dan kecepatan respons masih menjadi tantangan, terutama dalam menghubungkan

data produksi, stok, harga, dan kelompok rentan secara terpadu. ([Bank Indonesia](#))

Ketiga, struktur geografis Indonesia membuat biaya distribusi tetap tinggi, terutama untuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Keempat, perubahan iklim memperbesar risiko ketidakpastian produksi, sementara adaptasi di tingkat petani berjalan tidak merata. Kelima, ketahanan pangan sering masih dinilai terlalu sempit dari stabilitas komoditas pokok, padahal kualitas diet dan hasil gizi belum selalu menjadi indikator utama keberhasilan. ([Open Knowledge Portal](#))

Karena itu, tantangan terbesar bukan hanya merumuskan strategi yang benar, tetapi memastikan bahwa strategi tersebut dijalankan secara konsisten lintas waktu, lintas wilayah, dan lintas sektor. Negara yang hanya bergerak saat harga naik akan selalu terlambat. Ketahanan pangan menuntut kebijakan antisipatif, bukan sekadar reaktif. ([World Bank](#))

---

## 8. Kesimpulan

Ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global harus dipahami sebagai kemampuan sistem pangan untuk tetap menyediakan pangan yang cukup, terjangkau, bergizi, dan stabil ketika menghadapi inflasi, konflik, perubahan iklim, gangguan perdagangan, dan guncangan sosial-ekonomi lainnya. Data global menunjukkan bahwa ancaman ini nyata: 673 juta orang masih lapar pada 2024, sekitar 2,3 miliar orang mengalami kerawanan pangan moderat atau berat, sekitar 2,6 miliar orang tidak mampu membeli diet sehat, dan lebih dari 295 juta orang di 53 negara mengalami kelaparan akut. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa dunia belum memiliki sistem pangan yang benar-benar tangguh. ([FAOHome](#))

Bagi Indonesia, situasinya bersifat ganda. Di satu sisi, peningkatan produksi beras pada 2025, penguatan cadangan, serta penurunan angka kemiskinan dan stunting adalah perkembangan yang positif. Di sisi lain, inflasi, kemiskinan perdesaan, kerentanan produsen, disparitas logistik, dan kebutuhan intervensi harga menunjukkan bahwa sistem pangan nasional masih membutuhkan penguatan struktural. Ketahanan pangan Indonesia karena itu tidak boleh dipahami hanya sebagai keberhasilan panen, tetapi sebagai keberhasilan mengelola seluruh sistem dari hulu hingga hilir. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini menegaskan bahwa membangun ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global menuntut pendekatan sistemik: produksi adaptif terhadap iklim, diversifikasi pangan, logistik yang efisien, cadangan yang kredibel, perlindungan sosial yang kuat, integrasi dengan agenda gizi, tata kelola berbasis data, dan kerja sama regional-global yang cerdas. Dengan pendekatan tersebut, ketahanan pangan dapat berfungsi bukan sekadar sebagai tujuan sektor pertanian, tetapi sebagai pilar stabilitas ekonomi, kualitas sosial, dan kedaulatan bangsa dalam menghadapi masa depan yang makin kompleks. ([Bank Indonesia](#))

---

## Glosarium

**Ketahanan pangan:** kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk hidup aktif dan sehat. ([World Bank](#))

**Ketersediaan pangan:** keberadaan pangan secara fisik melalui produksi, impor, cadangan, dan distribusi. ([World Bank](#))

**Akses pangan:** kemampuan rumah tangga memperoleh pangan secara ekonomi maupun fisik. ([World Bank](#))

**Utilisasi pangan:** pemanfaatan pangan oleh tubuh yang dipengaruhi mutu gizi, keamanan pangan, sanitasi, dan kesehatan. ([World Bank](#))

**Stabilitas pangan:** keberlanjutan ketersediaan, akses, dan utilisasi pangan dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi guncangan. ([World Bank](#))

**Inflasi pangan:** kenaikan harga komponen pangan yang menekan daya beli masyarakat, terutama rumah tangga miskin. ([The World Bank](#))

**Diet sehat:** pola makan yang cukup, seimbang, beragam, dan aman untuk mendukung kesehatan dan produktivitas. ([FAOHome](#))

**Kerawanan pangan akut:** kondisi serius ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan minimum dan memerlukan intervensi mendesak. ([World Food Programme](#))

**Stunting:** kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lingkungan yang tidak sehat. ([Kementerian Kesehatan](#))

**Cadangan Beras Pemerintah (CBP):** stok beras yang dikelola negara untuk stabilisasi pasokan, harga, dan bantuan pangan. ([Badan Pangan Nasional](#))

**SPHP:** Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, program intervensi penyaluran beras untuk menjaga kestabilan harga. ([Badan Pangan Nasional](#))

**Entitlement:** kemampuan seseorang atau rumah tangga memperoleh pangan melalui pendapatan, aset, produksi, atau pertukaran ekonomi. ([OUP Academic](#))

**Resiliensi pangan:** kemampuan sistem pangan untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari gangguan seperti inflasi, bencana, atau perubahan iklim. ([Open Knowledge Portal](#))

**Volatile food:** kelompok komoditas pangan yang harganya mudah berfluktuasi karena faktor musim, cuaca, dan distribusi. ([Bank Indonesia](#))

---

### Daftar Pustaka (APA 7)

Arezki, R., & Brückner, M. (2011). *Food prices and political instability* (IMF Working Paper No. 11/62). International Monetary Fund. ([IMF](#))

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, May 26). *SSGI 2024: Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%*. ([Kementerian Kesehatan](#))

Badan Pangan Nasional. (2025, July 5). *Resmi! Badan Pangan Nasional beri penugasan bantuan pangan beras ke Bulog*. ([Badan Pangan Nasional](#))

Badan Pangan Nasional. (2025, July 14). *Bantuan pangan beras mulai salur hari ini, penyangga ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah*. ([Badan Pangan Nasional](#))

Badan Pangan Nasional. (2026, January 22). *Stok Cadangan Beras Pemerintah bisa tembus 6 juta ton, tidak ada alasan harga melebihi HET*. ([Badan Pangan Nasional](#))

Badan Pangan Nasional. (2026, February 4). *Jaga keberlanjutan, pemerintah perpanjang kembali program SPHP beras 2025 hingga akhir Februari 2026*. ([Badan Pangan Nasional](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 2). *Luas panen padi pada tahun 2025 mencapai sekitar 11,32 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG)*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 2). *Produksi beras pada 2025 untuk konsumsi pangan penduduk sebanyak 34,69 juta ton.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, March 2). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, January 30). *Pemerintah dan Bank Indonesia perkuat sinergi menjaga inflasi 2026.* ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, February 11). *Fokuskan ketahanan pangan, GPIPS jadi strategi baru jaga inflasi.* ([Bank Indonesia](#))

Bellemare, M. F. (2015). *Rising food prices, food price volatility, and social unrest.* *American Journal of Agricultural Economics*, 97(1), 1–21. ([OUP Academic](#))

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025: Addressing high food price inflation for food security and nutrition.* ([UNICEF DATA](#))

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025, July 28). *Hunger declines globally, but rises in Africa and western Asia.* ([FAOHome](#))

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report.* ([Open Knowledge Portal](#))

Sen, A. (1981). *Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation.* Oxford University Press. ([OUP Academic](#))

World Bank. (2025). *Food security update.* ([The World Bank](#))

World Bank. (2025). *Global economic prospects.* ([Open Knowledge Portal](#))

World Bank. (2025). *What is food security? There are four dimensions.* ([World Bank](#))

World Food Programme. (2025). *Global report on food crises 2025.* ([World Food Programme](#))

World Meteorological Organization. (2026, January 14). *WMO confirms 2025 was one of warmest years on record.* ([Bank Indonesia](#))

---

---

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 11 Maret 2026  
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69129df8-12fc-8322-99e8-d3c683bbf9c4>